

LKJ 2022

LAPORAN KINERJA (LKj) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LKJ 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kegiatan tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan berbagai faktor baik bersifat dukungan maupun yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam menjadikan Kabupaten Belitong Timur menjadi **Belitong Timur Bangkit dan Berdaya**.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja Tahun Anggaran 2022, yang merupakan komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome, penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan kewajiban dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur yang merupakan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun dapat menjadikan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen, keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Belitong Timur,





DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.2.1 Tugas pokok dan fungsi kantor kesbangpol	
1.2.2 struktur organisasi kantor kesbangpol	
1.2.3 bagan struktur organisasi kantor kesbangpol	
1.4 Kepegawaian.....	6
1.3.1 jumlah pegawai berdasarkan struktur organisasi	
1.3.2 jumlah pegawai berdasarkan golongan	
1.3.3 jumlah pegawai berdasarkan eselonisasi	
1.3.4 jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	
1.3.5 jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian	
1.5 Sarana dan Prasarana	8
1.6 Ruang Lingkup.....	8
1.7 Teknik Pengumpulan Data	8

BAB II Perencanaan dan perjanjian kinerja

2.1 Perencanaan Kinerja	9
2.1.1. Rencana Strategis	9
2.1.1.1. Visi dan Misi	
2.1.1.2. tujuan dan sasaran	
2.1.1.3. strategi dan kebijakan	
2.1.1.4. keterkaitan visi,misi,tujuan,sasaran dan rencana target indikator tahun 2021-2026	
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	17
2.1.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	18
2.2 Perjanjian Kinerja	22

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

3.1 Kerangka pengukuran kinerja	23
3.2 Evaluasi kinerja	24
3.3 Analisis capaian kinerja	25
3.4 Akuntabilitas keuangan	42

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai visi dan misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja dimaksud adalah merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah..

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur telah melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dengan dasar rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2022, dimana dalam pelaksanaannya banyak menghadapi permasalahan yang menjadi tantangan dalam mewujudkan keberhasilan mencapai hasil seperti target yang telah ditetapkan dalam perencanaannya.

Dengan selesainya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di atas, guna peningkatan kualitas maupun kuantitas program kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur untuk masa yang akan datang perlu disusun suatu laporan sebagai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang memuat segala keberhasilan, permasalahan dan upaya penyelesaiannya atau kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur Tahun Anggaran 2022. Atas dasar tersebut, maka disusunlah laporan tahunan ini dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022.



1.2. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur adalah :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitong Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2008 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitong Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014 Nomor 19).
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43).
13. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menurut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur maka kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab kebijakan teknik dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial di daerah;

- Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial di daerah;
- Pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

1.3.2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur terdiri dari :

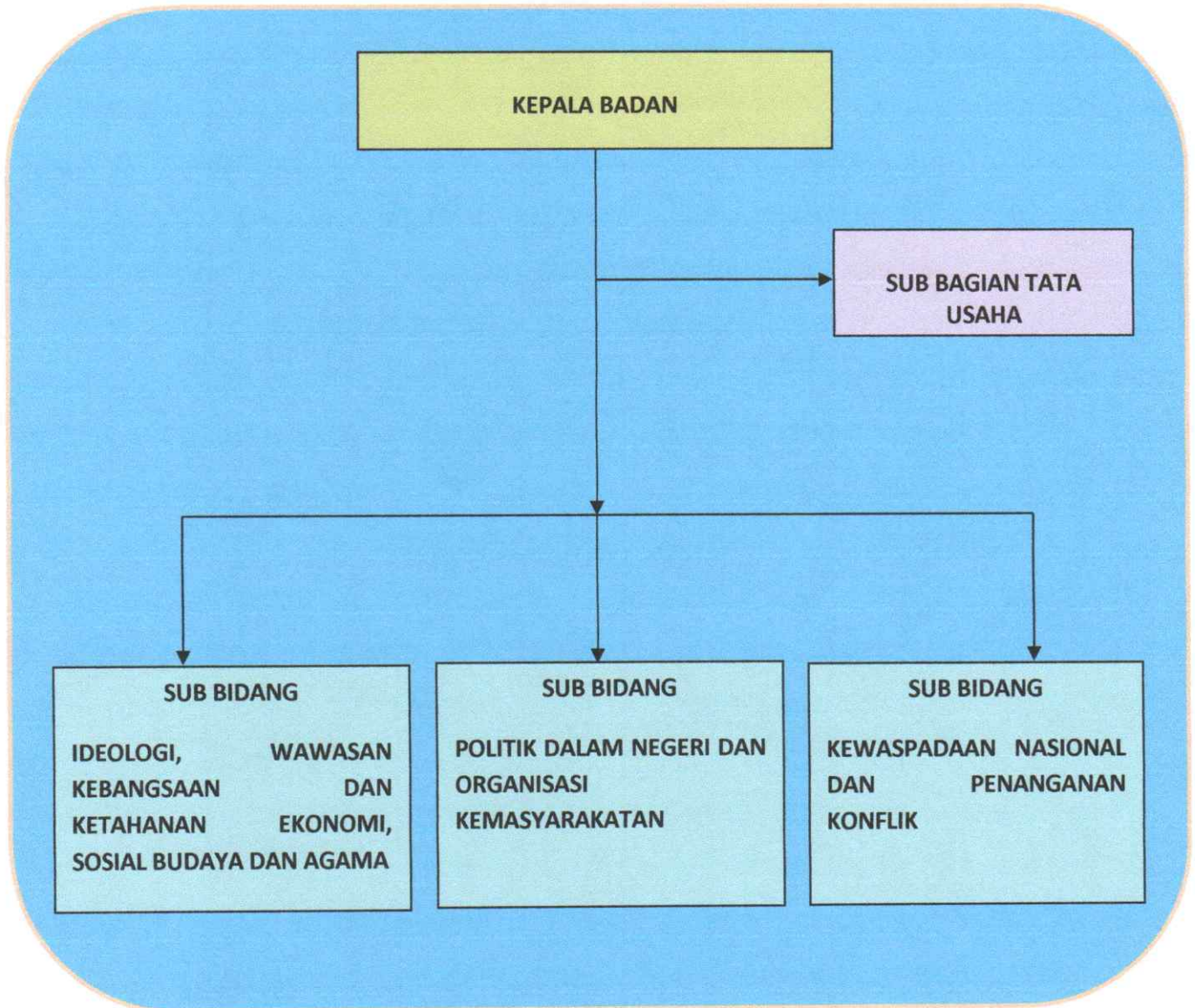
- a. Kepala Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- d. Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut :

Gambar. 1.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITONG TIMUR**





1.4. Kepegawaian

1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Unit Kerja	Jumlah	
		2021	2022
1	Kepala Badan	1	1
2	Sekretariat	12	12
3	Fungsional	1	1
4	Sub bid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	3	3
5	Sub bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2	2
6	Sub bid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	3	3
	Jumlah	22	22

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun 2022 berdasarkan penempatan pegawai

1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Golongan	Jumlah	
		2021	2022
1	Golongan IV	1	1
2	Golongan III	6	6
3	Golongan II	3	3
4	Golongan I	0	0
	JUMLAH	10	10

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun 2022

**1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi**

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Eselon	Jumlah	
		2021	2022
1	Eselon II	0	0
2	Eselon III	1	1
3	Eselon IV	3	3
	JUMLAH	4	4

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun 2022

1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2021	2022
1	S3	-	-
2	S2	-	-
3	S1	7	7
4	D3	2	2
5	SMA	10	10
6	SMP	2	2
7	SD	1	1
	JUMLAH	22	22

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun 2022

1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2021	2022
1	PNS	10	10
2	Tenaga Kontrak	12	12
	JUMLAH	22	22

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun 2022

1.5. Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 1.6
Jumlah Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2021	2022
1	Gedung Kantor	1	1
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	3	3
4	Kendaraan Roda 2	7	7
5	Meja Kerja	29	29
6	Kursi Kerja	36	36
7	Laptop	8	8
8	Printer	14	14
9	Komputer/PC	11	11

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 adalah:

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.
3. Pengukuran Kinerja, meliputi:
 - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.
 - b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2022.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan pelaporan tentu membutuhkan Teknik pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga apa yang disajikan menjadi pelaporan yang kredible, akurat dan akuntabel. Dalam penyusunan laporan kinerja ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur menggunakan standard operasional prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja selanjutnya menjadi acuan dalam pengumpulan data kinerja yang menggambarkan alur kerja dari produsen data yaitu sub bidang- sub bidang yang terlibat dalam menghasilkan data kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur

Perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Daerah perlu didukung oleh semua pihak terutama perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang diampu, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik maka Badan kesatuan Bangsa dan Politik Menyusun program/kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis badan tahun 2021-2026 yang menggambarkan titik akhir yang akan dituju.

2.1.1.1 Visi dan Misi

Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah tidak lagi mengusung Visi dan Misi sendiri melainkan mendukung Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih. Maka Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun guna mendukung Visi dan Misi kepala daerah mewujudkan **Belitung Timur Bangkit dan Berdaya** yaitu misinya yang pertama; Membenahi Manajemen Penyelenggaraan Ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.

2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran

Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur untuk mewujudkan **Visi dan Misi** melalui **Misi Pertama (M1)** Membenahi Manajemen Penyelenggaraan Ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik **Tujuan Pertama (T1)** Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien **sasaran keempat (S4)** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu :

- **T1S4S1** Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dengan



Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba

- **T1S4S2** Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat yang dapat di lihat dengan Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik.
- **T1S4S3** Terwujudnya kapabilitas aparaturnya dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik yang dapat dilihat dengan Tingkat persentase penanganan konflik secara damai.

Sebagai keterangan T1 adalah Tujuan dari Visi Misi dan Kepala Daerah, S4 merupakan sasaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah sedangkan S1, S2 dan S3 merupakan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan

Keberhasilan suatu kerangka perencanaan juga membutuhkan strategi dan kebijakan yang matang agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai, maka untuk mewujudkan kerangka perencanaan di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memilih strategi yang dianggap sesuai dan tepat yaitu :

A. Strategi yang ada di bidang ideologi, wawasan kebangsaan

- 1) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembauran bangsa demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Fasilitasi peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan jati diri bangsa yang menghargai bhineka tunggal ika.
- 3) Membina dan mengembangkan harmonisasi heterogenitas masyarakat sebagai potensi budaya daerah dan nasional guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Membina dan mengkoordinasikan tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba
- 5) Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba
- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelajar selaku generasi penerus bangsa

B. Strategi yang ada di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan

- 1) Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi bagi infrastruktur politik sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat
- 2) Mengayomi dan memberdayakan infrastruktur politik sebagai pilar demokrasi
- 3) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam semangat kemitraan kerja antara supra struktur dengan infra struktur politik
- 4) Mengembangkan pembinaan dinamika masyarakat kearah kehidupan yang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat



C. Strategi yang ada di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik

- 1) Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi atas penyelesaian konflik yang mengarah pada sinergitas bangsa di daerah
- 2) Mempercepat dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi untuk memacu penyelesaian konflik di daerah
- 3) Mempercepat jaringan informasi dan penyusunan data serta evaluasi perkembangan situasi konflik di daerah

2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra PD dengan RPJMD

Tabel berikut menggambarkan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra PD dengan RPJMD

Visi : **Belitung Timur bangkit dan Berdaya**
Misi I : **Membenahi Manajemen Penyelenggaraan Ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik**

NO	TUJUAN		SASARAN			ARAH KEBIJAKAN
	Tujuan OPD	Tujuan RPJMD	Sasaran OPD	Sasaran RPJMD		
1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1) Penataan Organisasi perangkat daerah dan Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembauran bangsa demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa. 2) Fasilitasi peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan jati diri bangsa yang menghargai bhineka tunggal ika. 3) Membina dan mengembangkan harmonisasi heterogenitas masyarakat sebagai potensi budaya daerah dan nasional guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4) Membina dan mengkoordinasikan tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika 5) Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya penggunaan narkotika 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelajar selaku generasi penerus bangsa



NO	TUJUAN		SASARAN				ARAH KEBIJAKAN
	Tujuan OPD	Tujuan RPJMD	Sasaran OPD	Sasaran RPJMD			
2	1	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokrasi yang damai	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	1	1	<p>Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi bagi infrastruktur politik sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat</p> <p>Mengayomi dan memberdayakan infrastruktur politik sebagai pilar demokrasi</p> <p>Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam semangat kemitraan kerja antara supra struktur dengan infra struktur politik</p> <p>Mengembangkan pembinaan dinamika masyarakat kearah kehidupan yang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat</p>
	2		1	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	1	1	
3	1	Meningkatkan pemahaman terhadap kewaspadaan dini serta menjaga keamanan dan keteriban untuk mencegah terjadinya konflik social di masyarakat	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	1	1	<p>Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi atas penyelesaian konflik yang mengarah pada sinergitas bangsa di daerah</p> <p>Mempercepat dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi untuk memacu penyelesaian konflik di daerah</p> <p>Mempercepat jaringan informasi dan penyusunan data serta evaluasi perkembangan situasi konflik di daerah</p>
	3		1	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	1	1	



2.1.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, bila dikaitkan dengan tujuan dan sasaran adalah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, idiologi negara, hak asasi manusia, pembauran bangsa dan kehidupan antar umat beragama	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Optimalisasi pembinaan demokrasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1) Penataan Organisasi perangkat daerah dan Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembauran bangsa demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa.2) Fasilitas peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan jati diri bangsa yang menghargai bhineka tunggal ika.3) Membina dan mengembangkan harmonisasi heterogenitas masyarakat sebagai potensi budaya daerah dan nasional guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia4) Membina dan mengkoordinasikan tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika5) Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya penggunaan narkotika6) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelajar selaku generasi penerus bangsa
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokrasi yang damai	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Meningkatkan penataan pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil bermartabat dan taat hukum	<ol style="list-style-type: none">1) Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi bagi infrastruktur politik sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat2) Mengayomi dan memberdayakan infrastruktur politik sebagai pilar demokrasi3) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam semangat kemitraan kerja antara supra struktur dengan infra struktur politik



Meningkatkan pemahaman terhadap kewaspadaan dini serta menjaga keamanan dan ketertiban untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat	Terwujudnya kapabilitas aparaturnya dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasaan pembangunan daerah	4) Mengembangkan pembinaan dinamika masyarakat kearah kehidupan yang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat 1) Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi atas penyelesaian konflik yang mengarah pada sinergitas bangsa di daerah 2) Mempercepat dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi untuk memacu penyelesaian konflik di daerah 3) Mempercepat jaringan informasi dan penyusunan data serta evaluasi perkembangan situasi konflik di daerah
---	--	--	---



2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2016-2022

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2016-2022 dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2016-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan
					Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	
1	Meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, ideologi negara, hak asasi manusia, pembauran bangsa dan kehidupan antar umat beragama	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran kebangsaan dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokrasi yang damai	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	60%	60%	75%	75%	75%	75%	75%
3	Meningkatkan pemahaman terhadap kewaspadaan dini serta menjaga keamanan dan ketertiban untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian knflik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau istilah nya Key Performance Indicator adalah Tolak Ukur yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran dari suatu rencana strategis. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Indikator Kinerja Utama ini menjadi pedoman dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Indikator kinerja utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti berikut :

No.	SASARAN		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Unit Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
	Sasaran Renstra OPD	Sasaran RPJMD					
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	Pemerintahan umum	Kesbangpol	Laporan hasil pelaksana kegiatan	
2	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian knflik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	Pemerintahan umum	Kesbangpol	Laporan hasil pelaksana kegiatan	
3	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	Pemerintahan umum	Kesbangpol	Laporan hasil pelaksana kegiatan	



2.1.3. Rencana kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Merupakan Pencajaran dari Renstra, memuat seluruh rencana dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun berjalan dan merupakan proses kerja dalam satu tahun dengan tolak ukur kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) guna menunjang proses akuntabilitas kinerja. Rencana Kinerja Tahunan juga merupakan implikasi dari Rencana Kerja Lima Tahunan yang dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan dimana pada Badan Kesatuan bangsa dan Poltik dapat Dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, idiologi negara, hak asasi manusia, pembauran bangsa, dan kehidupan antar umat beragama	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	182.768.200
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	102.789.000
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14.947.200
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	99.193.000
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	39.665.000
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	59.528.000



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokrasi yang damai	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	60%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.080.843.100
				Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26.639.900
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130.338.200
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	17.862.000
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	17.862.000
Meningkatkan pemahaman terhadap	Terwujudnya kapabilitas aparatur		100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	652.666.800



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
kewaspadaan dini serta menjaga keamanan dan ketertiban untuk mencegah terjadinya konflik social di masyarakat	dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	348.411.800 276.004.500 28.250.500



2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan komitmen dari penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan disertai dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur dari penilaian komitmen tersebut. Dengan adanya Perjanjian kinerja ini maka akan ada komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara pemberi dan penerima Amanah atas kinerja terukur melalui tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya manusia dan anggaran yang telah disetujui. Perjanjian Kinerja juga mencakup dampak (outcome) dari program dan kegiatan atau kinerja tahun-tahun sebelumnya yang merupakan kesinambungan kinerja selama periode tahun perencanaan lima tahunan. Berikut tabel yang menyajikan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis yang dirumuskan guna mendukung keberhasilan RPJMD Kabupaten Belitang Timur.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
	SASARAN RENSTRA OPD	SASARAN RPJMD yang diacu		
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%
2	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	60%
3	Terwujudnya kapabilitas aparaturnya dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan & RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Kategori, Nilai, dan Interpretasi
atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi	Kode Warna
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	
2	A	>80-90	Memuaskan	
3	BB	>70-80	Sangat Baik	
4	B	>60-70	Baik	
5	CC	>50-60	Cukup	
6	C	>30-50	Kurang	
7	D	0-30	Sangat Kurang	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitang Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, Renstra dan IKU badang Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengalami perubahan seiring dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026, hasil dari kaian dan evaluasi terhadap Renstra tahun 2021=2026 setelah menyesuaikan dengan perubahan RPJMD dimaksud, maka resntra mengalamu

perubahan agar lebih SMART (Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time-bound) agar pengukuran kinerja lebih optimal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuna Bangsa dan Politik memiliki 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

Sasaran 1 terdiri dari 1 (Satu) indikator sasaran ;

Sasaran 2 terdiri dari 1 (Satu) indikator sasaran ;

Sasaran 3 terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran.

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.2, Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

**Tabel 3.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%
3	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	60%
5	Terwujudnya kapabilitas aparaturnya dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	%	100	100	100
3	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	%	60	60	100
5	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	%	100	100	100

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitong Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : 1.1.1 Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1 Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini tidak dapat dilaksanakan sekali saja tetapi harus berkesinambungan dan jika memungkinkan sampai ke tingkat sekolah dasar sehingga pengenalan dini tentang wawasan dan karakter kebangsaan sudah tertanam. Indikator ini diwujudkan dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, dengan realisasi indikator sasaran pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 100% maka capaian kinerja indikator ini pada tahun 2022 yaitu

$$\frac{\text{Realisasi tahun 2022}}{\text{Target Tahun 2022}} = \frac{100\%}{100\%} = 100\%$$

dengan **Predikat Sangat Memuaskan**. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1. Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	Persen	100	100	100	100	100	100

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penjelasan

Indikator ini bertujuan meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, Ideologi Negara, Hak asasi manusia, Pembangunan Bangsa dan kehidupan antar umat beragama sehingga tidak ada lagi konflik di tengah masyarakat baik secara vertical maupun masyarakat. Yang

perwujudannya dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan besar anggaran sebesar Rp. 281.961.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.238.020.600,00 atau capaian realisasi sebesar 84,42% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun kedua program tersebut yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dengan Karakter Kebangsaan (terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan) dan program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan). Selain yang bersidang formil kegiatan rutin pelaksanaan kegiatannya juga mencakup :

A. Dialog Ideologi Bangsa

kegiatan Dialog Ideologi Bangsa untuk para generasi muda supaya selalu menanamkan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa sehingga generasi muda dalam mencapai tujuan dan cita-cita sesuai dengan adat aturan serta etika yang berlaku dimasyarakat. Pada kegiatan Dialog Ideologi Bangsa ini mengangkat tema "Bangkit Bergerak Bersama Pancasila" dimana kegiatan ini juga merupakan moment memperingati hari kesaktian pancasila yang jatuh pada tanggal 1 oktober sehingga mengingatkan kembali kepada generasi muda untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan agar tidak pernah pudar yang pelaksanaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Hotel Oasis Manggar dengan sasaran anak muda karangtaruna sekecamatan Manggar dengan harapan Agar para generasi muda tumbuh memiliki jiwa yang berwawasan kebangsaan dan nasionalisme sesuai dengan landasan Pancasila.



B. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitang Timur bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyelenggarakan pembinaan bagi masyarakat yang ada di Se- Kecamatan Damar untuk memberikan wawasan tentang upaya menciptakan kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat yang di hadiri tokoh agama, pemuda, perangkat desa dengan harapan

- Seluruh perangkat desa beserta tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat saling bersinergi menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.
- Perlunya kerja sama antar semua pihak untuk menangkal potensi penyebaran paham radikalisme di masyarakat.
- Untuk perangkat desa agar lebih aktif dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat terutama para pelajar agar terhindar dan tidak terpengaruh oleh konflik tentang agama.

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 di Rumah Makan Amaris Desa Burong Mandi dengan peserta terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat.



C. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba

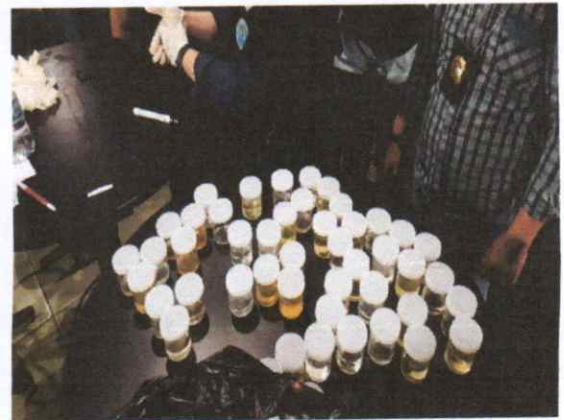
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan BNNK Kabupaten Belitung mengadakan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba. Pada kegiatan ini BNNK Kabupaten Belitung dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengambil tema Desa Bersih Narkoba (Bersinar), guna mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dengan menetapkan

Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitang Timur sebagai Desa Bersih Narkoba Tahun 2022 yang bertujuan Maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Belitang Timur adalah :

- Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terutama yang ada dilingkungan Pemerintah Desa akan bahaya narkoba
- Menumbuhkan kesadaran kepada generasi muda khususnya pelajar akan pentingnya hidup sehat tanpa narkoba.

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 s.d 28 Juli 2022 di Kantor Desa Lalang dengan sasaran perangkat desa, dan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melaksanakan pemantauan Bersama pihak berwajib dalam mengawasi pergerakan peredaran narkoba di tangan-tangan masyarakat.



b. Analisis Peningkatan/penurunan Kinerja

Indikator sasaran ini memiliki capaian kinerja 100% sama seperti tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang diasumsikan berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan data sub kegiatan yang sudah terlaksana kegiatan ini berjalan dengan baik dengan realisasi fisik 100%, dimana output dari sub kegiatan terlaksana dengan optimal.

Tabel berikut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2022. Tingkat capaian kinerja sasaran disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.4
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1 Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Unsur Keterwakilan / Kelompok Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kerbangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Karang Taruna Desa, Ketua Paguyuban selaku Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	30	30	100%
2	Sub Kegiatan Perumusan Kegiatan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelajar	50	50	100%
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Opd, ASN dan Siswa/pelajar	6	6	100
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Masyarakat, Perangkat Desa	2	2	0
5	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Perangkat Desa	50	50	100%



Keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran merupakan masalah utama dan klasikal dalam pelaksanaan indikator ini, dimana pada sub bidang yang melaksanakan kewenangan ini hanya memiliki 3 orang saja Degan rincian 2 orang ASN dan 1 orang pegawai tenaga kontrak yang diperbantukan dari sub bagian tata usaha. Dan juga membutuhkan dukungan anggaran yang besar karena untuk membangun manusianya tidak cukup dengan sekali kegiatan saja tetapi butuh literasi dan sosialisasi yang berkesinambungan.

c. Solusi

Kekurangan Sumber Daya Aparatur dapat disiasati dengan sistem kerja gotong royong, dimana kegiatan tidak lagi tersekat oleh sub bidang atau unit organisasi pengampu, melainkan dikerjakan secara Bersama-sama dengan sub bidang pengampunya sebagai penanggungjawab kegiatan tersebut sehingga tetap dapat dipantau agar dapat berjalan dengan baik, Sementara untuk anggarannya sebahagian memakai anggaran dari sekretariat atau kegiatan rutin bahkan sebahagian tanpa anggaran atau non budgeter akan tetapi diupayakan tidak mengurangi mutu dan hasil yang ditargetkan.

Melihat dari urgensi kebutuhannya dimana indikator sasaran ini juga merupakan objek vital untuk membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sehingga tercipta persatuan dimana Pancasila sebagai perekat kebangsaannya dengan menciptakan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.

Sasaran 2 : 2.2.1 Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat

Salah satu fungsi partai adalah memperjuangkan kepentingan publik melalui kebijakan publik untuk kepentingan Bersama, dalam proses ini ada dua hal yang diperjuangkan partai politik; yaitu pertama, melakukan dialog secara intensif dengan masyarakat untuk mengetahui publik. Anggota DPR mewujudkan hal ini dengan melakukan kunjungan kerja dan kegiatan survey opini publik, kedua; Isu publik yang diangkat dalam pembahasan parlemen hingga menjadi keputusan politik. Maka untuk menghasilkan suatu keputusan publik dan dibutuhkan keterikatan antara pemilih dan yang dipilih dalam hal ini perwakilan di Dewan atau sering disebut dengan DPR/D.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1. Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Persen	60	60	100	60	60	100

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penjelasan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat dengan 1 (satu) Indikator Sasaran dengan capaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 60% dari target yang ditetapkan sebesar 60% atau dengan kata lain kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar :

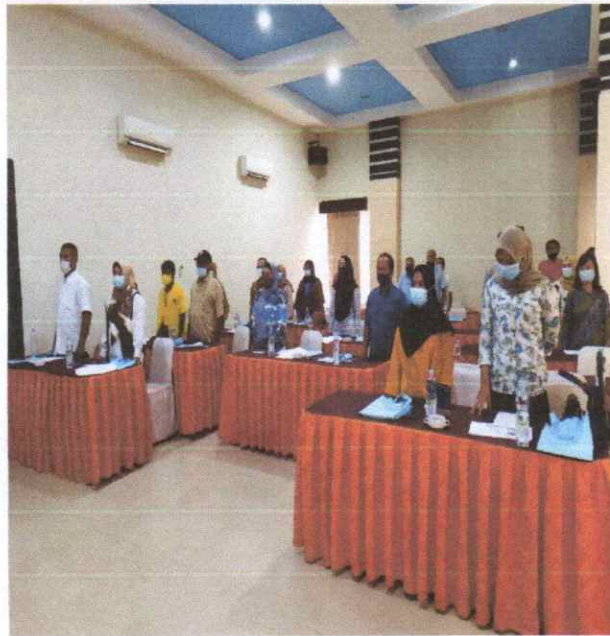
$$\frac{\text{Realisasi tahun 2022}}{\text{Target Tahun 2022}} = \frac{60\%}{60\%} = 100\%$$

didasari dari hasil pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022, Indikator ini bertujuan Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokgrasi yang damai dengan terselenggaranya pendidikan politik yang di laksanakan oleh setiap partai politik yang ada di Kabupaten Belitong Timur dengan melaksanakan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.098.705.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.078.044.100,00 dengan kata lain capaian realisasi sebesar 98,12 sedangkan capaian realisasi fisik sebesar berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Bimbingan teknis pelaporan pertanggungjawaban hibah partai politik

Dilaksanakan pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dihadiri oleh pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Belitong Timur yaitu sebanyak 10 partai pada bulan Februari tahun 2022, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dan narasumbernya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini bertujuan agar partai politik yang menerima dana hibah dapat memberikan laporan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel sehingga dapat meningkatnya trust / kepercayaan dari konstituennya dengan harapan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi semakin meningkat dan membentuk hubungan erat antar pemilih dan yang terpilih sebagai wakil.



- **Monitoring Pemilihan Kepala Desa Serentak**

Monitoring dilaksanakan sebagai upaya menjaga proses pemilihan dapat berjalan dengan baik dan jujur yang dilaksanakan secara serentak sebanyak 18 (dealapan belas) desa di kabupaten Belitung Timur pada bulan April tahun 2022 berdasarkan tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melibatkan unsur masyarakat (tokoh masyarakat, Pemerintahan Desa) dan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Hasil Pemilihan



- Verifikasi hibah bantuan partai politik

Berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Belitong Timur, sebesar Rp. 15.000,- per suara sah dengan rincian sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45-285 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 April

2022 yaitu sebesar Rp. 907.965.000,- dengan besaran masing-masing parpol sesuai dengan jumlah suara sah dan kursi yang diperoleh pada pemilihan legislatif.



Disamping itu juga mendata atau verifikasi partai politik yang baru dibentuk di Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2022, daftar partai politik yang ada di Kabupaten Belitong ada sebanyak 30 (tiga puluh) partai.

- Verifikasi Organisasi Masyarakat

Verifikasi dan pendataan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Belitong Timur sebagai upaya dalam pengawasan dan pencegahan berkembangnya organisasi asing dan organisasi masyarakat terlarang secara peraturan dan perundang-undangan.

**Data Jumlah Organisasi Yang dibentuk di Kabupaten Belitang Timur
s/d Bulan Oktober Tahun 2022**

No	Kecamatan	Keterangan		
		Terdaftar	Terdata	Jumlah
1	Manggar	8	16	24
2	Kelapa Kampit	3	-	3
3	Simpang Renggiang	2	-	2
4	Damar	3	-	3
5	Gantung	7	-	7
6	Dendang	2	-	2
	Jumlah	25	16	41

**Data Jumlah Organisasi Yang Terdata dan Terdaftar
di Kabupaten Belitang Timur s/d Bulan Oktober Tahun 2022**

No	Kecamatan	Keterangan*		
		Terdaftar Pusat/Cabang	Terdata Pusat/Cabang	Jumlah
1	Manggar	62	13	75
2	Kelapa Kampit	5	-	5
3	Simpang Renggiang	2	-	2
4	Damar	5	2	7
5	Gantung	11	8	19
6	Dendang	2	-	2
	Jumlah	87	23	110

Pada kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak 110 organisasi masyarakat di Kabupaten Belitang Timur dengan sebanyak 41 organisasi masyarakat diantaranya dibentuk di Kabupaten Belitang Timur dengan rincian 25 Organisasi telah terdaftar sedangkan 16 organisasi masih bersifat terdata karena belum mendaftarkannya.



b. Analisis Peningkatan/penurunan Kinerja

Indikator sasaran ini memiliki capaian kinerja 100% sama seperti tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang diasumsikan berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan data sub kegiatan yang sudah terlaksana kegiatan ini berjalan dengan baik dengan realisasi fisik 100%, dimana output dari sub kegiatan terlaksana dengan optimal.

Tabel 3.6
Tingkat capaian kinerja sasaran 2.2.1 Tahun 2020

No	Kegiatan	Unsur Keterwakilan / Kelompok Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai politik	11	10	90,91%
2.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ketua dan kader partai politik	30	30	100%
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Stakeholder, pelajar	20	20	100%
4.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, LSM, OKP	60	60	100%

Pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami banyak kendala, akan tetapi perlu peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya terutama dalam fasilitasi bagi pemilih pemula agar lebih memahami sistem demokrasi dan mengenal calon wakil yang akan dipilih agar menghasilkan suatu pesta demokrasi yang lebih mengutamakan kredibilitas dan kompetensi.

a. Solusi

Dari table diatas dapat kita lihat pada tahun 2022 pendidikan politik sudah sangat baik untuk itu perlu dipertahankan dan di sosialisasikan guna mewujudkan masyarakat di Kabupaten Belitong Timur yang cerdas dalam berdemokrasi dan mengeluarkan pendapat, maka untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah sehingga bisa meningkatkan target dan capaian kinerja yang lebih baik lagi dan kegiatan tersebut dapat terselenggara pada tahun depan, terutama dalam hal dukungan anggaran dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)nya. Kemudian untuk kegiatan organisasi masyarakat semoga ditahun selanjutnya bisa di terselenggara tanpa adanya pengurangan atau pun pemotongan dari segi anggaran.

Sasaran : 3.3.1 Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3.3.1 Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2022 sebesar 100% dengan rumusan :

**Tabel 3.7. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran 2.2.1. Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal	Persen	100	100	100	100	100	100

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penjelasan

Indikator ini bertujuan untuk Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Dini Serta Menjaga Kamanan dan Ketertiban Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Sosial di Masyarakat dengan pembinaan dan deteksi dini konflik sara di daerah dengan melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 3 (tiga) sub kegiatan. Total anggaran mencapai sebesar Rp. 652.666.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 435.947.202,00 atau capaian sebesar 66,79%. Sedangkan realisasi fisiknya mencapai diasumsikan 100% karena tidak adanya gangguan keamanan atau konflik sosial /sara ditengan-tengah masyarakat Kabupaten Belitong Timur dengan berbagai aktifitas atau kegiatan seperti :

- Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 188.45-223 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 yang melibatkan unsur vertikal dan lintas sektor yang memiliki kewenangan di bidang hukum, keamanan, imigrasi unit penyelenggara pelabuhan sebagai pintu masuk kedatangan.

**Tabel Data Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Tahun 2022
Pada Kabupaten Belitong Timur**

NO.	NAMA PT	NEGARA ASAL	JUMLAH
1	PT. TOMMY UTAMA	CHINA	1
2	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	MALAYSIA	6
		TAIWAN	1
3	PT. PARIT SEMBADA	MALAYSIA	2
4	PT. SURYA MAS BELTIM INDO MAKMUR	CHINA	5
5	PT. MENARA CIPTA MULIA	MALAYSIA	1
6	PT. DAMAR MINERAL INDOTAMA	CHINA	1
7	PT. INDO MAKMUR ALAM RAYA	CHINA	2
	JUMLAH TOTAL		19

Ada sebanyak 19 orang tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Belitong Timur berdasarkan data yang ada.

- Forum Kewaspadaan

Pembentukan forum dengan membentuk TIM Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Belitong Timur sesuai Surat Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 188.45-273 TAHUN 2022 tanggal 30 Maret 2022 langsung dibawah pengarahannya dari Bupati Belitong Timur melibatkan unsur intelijen sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk kewaspadaan dini dengan mengawasi, mengumpulkan informasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan untuk mendeteksi secara dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Belitong Timur yang mengancam stabilitas Nasional.

- Penanganan Konflik Sosial

Pembentukan Tim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 188.45-272 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Belitong Timur sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang secara teknis langsung dibawah pengarahannya Bupati dan Wakil Bupati Belitong Timur yang melibatkan instansi vertikal dengan tujuan mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi efektifitas penanganan konflik sosial di Kabupaten Belitong Timur. Tim juga melaksanakan pemetaan, pemantauan, merespon secara cepat dan mengambil Tindakan yang dibutuhkan secara responsif terhadap gejala atau terjadinya gangguan keamanan.

b. Analisis Peningkatan/penurunan Kinerja

Adapun peningkatan persentase capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 ini adalah karena didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi anggota yang tinggi, kondisi politik daerah yang kondusif serta penganggaran yang optimal. Peningkatan capaian kinerja yang tinggi harus pula ditunjang oleh kelengkapan ataupun sarana prasarana yang digunakan untuk kelancaran tugas dari para anggota Tim dilapangan, terutama dimasa pandemi sekarang ini protokol kesehatan dalam menjalankan tugas tetap perlu diperhatikan sehingga semua kegiatan yang ada bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Tingkat capaian kinerja sasaran 3.3.1 Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.8
Tingkat capaian kinerja sasaran 3.3.1 Tahun 2022

No	Kegiatan	Unsur Keterwakilan / Kelompok Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	vertikal	1	1	100%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Vertikal, opd	1	1	100%
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Vertikal, opd, Masyarakat	1	1	100%

Capaian kinerja yang dihasilkan akan optimal dengan koordinasi yang secara terus menerus baik dengan instansi vertikal maupun horizontal dan juga lintas sektor karena pengawasan membutuhkan jaringan yang luas agar dapat menjangkau titik terjauh bahkan wilayah yang sangat sensitif karena aneka ragam etnis, adat, budaya maupun karakteristik kewilayahan masyarakat yang ada di Kabupaten Belitang Timur.

c. Solusi

Melihat dari informasi pada poin a dan b diatas tergambar bahwa dukungan Pemerintah Daerah berbanding lurus dengan pencapaian target kinerja pemerintah pula. Untuk mencapai sasaran 3.3.1 yang optimal diharapkan dukungan anggaran yang optimal pula kepada Pemerintah Daerah bagi pembiayaan operasional dan pengadaan sarana penunjang kinerja anggota.



3.4 Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2022 rencana program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitong Timur Belanja Daerah sebesar Rp.4.920.098.606,00 dan (empat milyar Sembilan ratus dua puluh juta Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah_ dapat direalisasikan sebesar Rp4.016.972.430,00 (empat milyar enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atau capaian realisasi anggaran sebesar 81,64% dengan kata lain ada silva sebesar Rp. 903.126.176,00 atau sebesar 18,36%.

Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Rincian Alokasi Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Daerah	4.904.098.606,00	4.016.972.430,00	81,91
	Belanja Operasi	4.738.932.606,00	3.855.983.430,00	81,37
	a. Belanja Pegawai	1.367.655.230,00	1.120.832.605,00	81,95
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.463.312.376,00	1.827.185.825,00	74,18
	c. Belanja Hibah	907.965.000,00	907.965.000,00	100,00
	Belanja Modal	165.166.000,00	160.989.000,00	97,47
	a. Belanja Modal	165.166.000,00	160.989.000,00	97,47

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Mencapai Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasional	2.886.765.506,00	2.247.448.528,00	77,85
2	Belanja Langsung Untuk Sasaran	2.033.333.100,00	1.769.523.902,00	87,03



Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Jml	Jml	Pagu Anggaran	Realisasi	%
		Prog	Sub Keg	(Rp)	Anggaran (Rp)	
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	2	5	281.961.200,00	238.020.600,00	84,42
3	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	2	4	1.098.705.100,00	1.078.044.100,00	98,12
5	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik	1	3	652.666.800	435.947.202,00	66,79
Jumlah		5	12	1.556.506.595	1.467.597.375	94,28%

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana terlampir.



Tabel 3.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Sasaran			Program dan Sub Kegiatan			Input (Rp)	
Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%		
2 1 1 1 Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	1 1 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	182.768.200,00	166.613.200,00	96,26%		
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	102.789.000	101.164.000	98,42		
		2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	65.032.000	50.502.000	77,66		
		3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14.947.200	14.947.200	100,00		



Sasaran				Program dan Sub Kegiatan				
Sasaran Renstra		Sasaran RPJMD		Target	Input (Rp)	%		
					Realisasi			
2	2	1	4	2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.080.843.100,00	1.078.044.100,00	91,16	
		1	1		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	923.865.000	923.865.000	100,00
		1	1		2 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26.639.900	23.889.900	89,68
				3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	130.338.200	130.289.200	99,96%	



Sasaran		Sasaran Renstra		Sasaran RPJMD		Program dan Sub Kegiatan					
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran bangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	1	1	1	4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	99.193.000,00	71.407.400,00	71,99
									39.665.000	31.265.000	78,82
3	Terwujudnya kapabilitas aparatatur dalam hal ceegah dan	3	1	1	2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	17.862.000,00	17.512.000,00	98,04
									17.862.000	17.512.000	98,04
3	Terwujudnya kapabilitas aparatatur dalam hal ceegah dan	3	1	1	2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	Program Pemberdayaan dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	652.666.800,00	435.947.202,00	66,79
									59.528.000	40.142.400	67,43
3	Terwujudnya kapabilitas aparatatur dalam hal ceegah dan	3	1	1	2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	652.666.800,00	435.947.202,00	66,79
									59.528.000	40.142.400	67,43
3	Terwujudnya kapabilitas aparatatur dalam hal ceegah dan	3	1	1	2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	652.666.800,00	435.947.202,00	66,79
									59.528.000	40.142.400	67,43
3	Terwujudnya kapabilitas aparatatur dalam hal ceegah dan	3	1	1	2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	652.666.800,00	435.947.202,00	66,79
									59.528.000	40.142.400	67,43



Sasaran		Program dan Sub Kegiatan	Input (Rp)		
Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD		Target	Realisasi	%
tanggal dalam penyelesaian konflik secara dini		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	348.411.800	214.853.651	61,67
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	276.004.500	200.093.551	72,50
		3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	28.250.500	21.000.000	74,33
Total			1.135.258.200,00	858.093.002,00	75,59

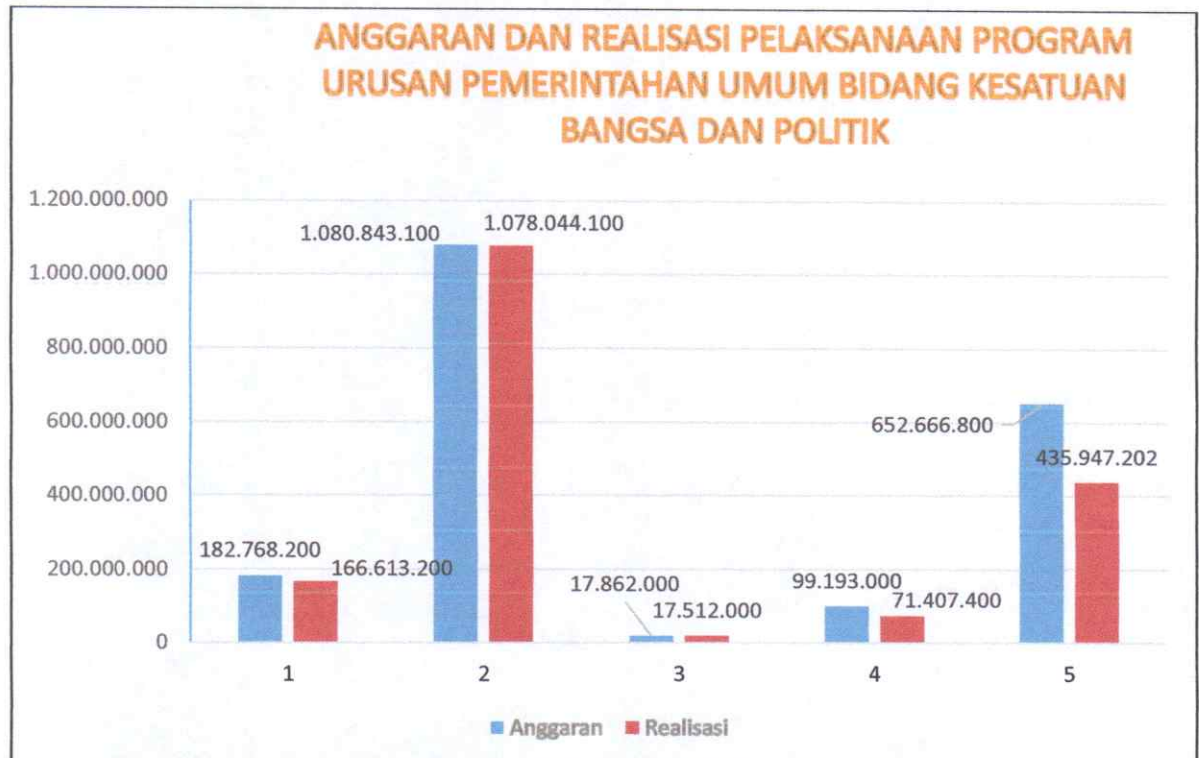


Berikut ini gambaran Capaian realisasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Tabel : Anggaran dan Realisasi Keuangan pada Masing-Masing Pogram urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	182.768.200,00	166.613.200,00	91,16%
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.080.843.100,00	1.078.044.100,00	99,74%
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	17.862.000	17.512.000	98,04%
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	99.193.000	71.407.400	71,99%
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	652.666.800	435.947.202	66,79%

Grafik 1
anggaran dan realisasi anggaran pada masing-masing Program (per Urusan)



Pada tabel di atas dapat dilihat ada 5 program yang dilaksanakan dalam menjalankan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2022 dengan kriteria masing-masing program sebagai berikut :

a. Sangat tinggi,

Ada 3 program dengan kinerja sangat tinggi yaitu mencapai 90% ke atas yaitu:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan realisasi sebesar 91,16%
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan realisasi sebesar 99,74%
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan realisasi sebesar 98,04%

b. Tinggi

Ada 1 (satu) program dengan kinerja tinggi yaitu mencapai $66\% \leq 75\%$ yaitu :

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dengan realisasi sebesar 71,99%
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan realisasi sebesar 66,79%,

1. Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Tabel Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Program

No	Program	Target Fisik	Realisasi	Capaian Kinerja (Persen)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (Persen)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100,00	182.768.200	166.613.200	91,16
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	92,23%	92,23	182.768.200	166.613.200	91,16
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100,00	17.862.000	17.512.000	98,04

No	Program	Target Fisik	Realisasi	Capaian Kinerja (Persen)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (Persen)
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100%	94,00%	94,00	99.193.000	71.407.400	71,99
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	100,00%	100,00	652.666.800	435.947.202	66,79



Grafik diatas menunjukkan bahwa kinerja semua program termasuk kategori sangat tinggi dengan capaian kinerja semua berada pada interval $91 \leq 100$ dengan kriteria sangat tinggi, sedangkan realisasi anggaran masing-masing program ada 3 program dengan realisasi sangat tinggi yaitu diatas 90% dan ada 2 program dengan realisasi anggaran kriteria sedang dengan interval capaian realisasi $66 \leq 75$.

2. Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan

Tabel Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran

No	Program	Target Fisik	Realisasi	Capaian Kinerja (Persen)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (Persen)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	27.927.900	3.570.000	12,78
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	1.385.686.700	1.136.500.855	82,02
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	40.800.000	25.200.000	61,76
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	502.477.650	297.818.251	59,27



No	Program	Target Fisik	Realisasi	Capaian Kinerja (Persen)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (Persen)
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	53.166.000	50.939.000	95,81
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	454.428.856	427.498.522	94,07
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	422.278.400	305.921.900	72,45
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100	182.768.200	166.613.200	91,16
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	100	1.080.843.100	1.078.044.100	99,74
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100	17.862.000	17.512.000	98,04
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100	99.193.000	71.407.400	71,99
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100	652.666.800	435.947.202	66,79

Grafik Capaian kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran Kegiatan



Tabel dan Grafik di atas memperlihatkan bahwa dari 12 kegiatan yang ada mencapai realisasi kegiatan yang berkategori sangat tinggi, dimana capaian kinerja kegiatan yang ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk realisasi anggaran dari ke-12 kegiatan tersebut ada 1 kegiatan yang berkategori rendah dikarenakan seperti dijelaskan sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan lain dan untuk anggarannya memakai anggaran kegiatan rutin lainnya akan tetapi tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan, sehingga serapan anggarannya tidak maksimal, sedangkan 2 kegiatan berkategori rendah dikarenakan ada beberapa uraian belanja objek yang tidak dilaksanakan dan juga sistem penganggaran yang tidak memungkinkan untuk terserap maksimal seperti belanja perjalanan dinas. Sedangkan kegiatan lainnya terdapat 3 kegiatan pencapaian realisasi kategori sedang, 1 kegiatan dengan realisasi anggaran kategori tinggi dan 5 kegiatan serapan anggarannya sangat tinggi.



3. Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan

Tabel Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sub Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Target Fisik	Realisasi	Capaian Kinerja (Persen)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (Persen)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100	17.060.400	3.570.000	20,93
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100	8.900.000	0	-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	1.967.500	0	-
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30	10	33	1.367.655.230	1.120.832.605	81,95
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	15.844.250	14.308.250	90,31
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100	2.187.220	1.360.000	62,18
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	2	100	40.800.000	25.200.000	61,76
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	5	100	20.822.000	20.374.000	97,85
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	20	100	51.690.550	51.627.500	99,88
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15	15	100	23.202.500	5.432.000	23,41
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15	15	100	52.813.600	42.235.000	79,97
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	5	100	25.564.000	25.562.500	99,99
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	90	90	328.385.000	152.587.251	46,47
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	4	100	53.166.000	50.939.000	95,81
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100	163.530.000	151.250.000	92,49
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	100	50.700.000	37.119.206	73,21
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	100	70.832.500	69.832.500	98,59
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	100	169.366.356	169.296.816	99,96
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	100	63.536.000	44.003.700	69,26



No	Sub Kegiatan	Target Fisik	Realisasi	Capaian Kinerja (Persen)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (Persen)
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	7	100	172.092.400	130.308.200	75,72
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	6	100	49.650.000	12.560.000	25,30
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100	98.500.000	98.000.000	99,49
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	100	38.500.000	21.050.000	54,68
24	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30	30	100	102.789.000	101.164.000	98,42
25	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50	50	100	65.032.000	50.502.000	77,66
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6	6	100	14.947.200	14.947.200	100,00
27	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	11	10	91	923.865.000	923.865.000	100,00
28	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30	30	100	26.639.900	23.889.900	89,68



No	Sub Kegiatan	Target Fisik	Realisasi	Capaian Kinerja (Persen)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (Persen)
29	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20	20	100	130.338.200	130.289.200	99,96
30	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60	60	100	17.862.000	17.512.000	98,04
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10	7	70	39.665.000	31.265.000	78,82
32	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	50	100	59.528.000	40.142.400	67,43
33	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	100	348.411.800	214.853.651	61,67
34	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	100	276.004.500	200.093.551	72,50

No	Sub Kegiatan	Target Fisik	Realisasi	Capaian Kinerja (Persen)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (Persen)
35	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	100	28.250.500	21.000.000	74,33

Grafik Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sub kegiatan



Tabel dan grafik diatas menunjukkan dari 33 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 dengan capaian kinerja 33 atau 94% sub kegiatan berkategori Sangat Tinggi sedangkan yang lainnya 1 sub kegiatan berkategori Sedang dan 1 Sub Kegiatan berkategori sangat rendah dikarenakan perkiraan jumlah pegawai yang dianggarkan sesuai dengan Struktur Organisasi tidak terpenuhi yaitu sebanyak 33 pegawai sedangkan pegawai yang ada hanya 10 pegawai atau hanya 33 persen dari target pegawai yang seharusnya sesuai dengan peta jabatan.

Sedangkan untuk realisasi anggarannya dari 35 sub kegiatan yang ada terdapat 14 Sub kegiatan atau 40 persennya serapannya berkategori Sangat Tinggi, 6 sub kegiatan atau 17 persennya serapan berkategori Tinggi, 5 sub kegiatan atau 14 persennya dengan serapan berkategori Sedang, 4 sub kegiatan atau 12 persennya dengan serapan Rendah dan selebihnya yaitu 6 Sub kegiatan atau 17 persennya memiliki serapan yang Sangat Rendah. Adapun faktor rendahnya



serapan anggaran pada sub kegiatan tersebut telah dijabarkan pada ulasan sebelumnya, akan tetapi faktor kerendahan realisasi anggaran tersebut diupayakan tidak terlalu berpengaruh dalam keberhasilan capaian kerjanya.

Interval Kategori Penilaian Realisasi Fisik dan Anggaran

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja (LKJ) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan.

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. BELITONG TIMUR,



YUSMAWANDI, S.Pd
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19670118 199003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar – Gantung,
Dsn. Manggarawan, Ds. Padang, Kec. Manggar,
Kabupaten Belitung Timur 33516 Telp: (0719)-9220123
Email: kesbangpol@belitungtimurkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 188.4- TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pelaporan hasil capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj), maka perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya yang tersebut dalam Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur .

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 bertugas mengumpulkan data dan informasi capaian kinerja tahun 2022 dan menyusun dokumen Laporan Kinerja (LKj).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Belitung Timur,



YUSMAWANDI, S.Pd
Pembina TK I
NIP. 19670118 199003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kabupaten Belitung Timur
Nomor : 188.4- TAHUN 2023
Tanggal : Januari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YUSMAWANDI, S.Pd NIP. 19670118 199003 1 002 Pembina Tk. I /IVb	Kepala Badan	Ketua
2	RUDI DAMANIK, S.Si NIP. 19760419 201001 1 002 Penata / IIIc	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3	RYAN FERDIANSYAH, S.IP NIP. 197901232011011001 Penata / III.c	KEPALA SEKSI PEMBINAAN POLITIK DAN KEMASYARAKATAN	Anggota
4	DUAN, S.Sos NIP. 198009212010011012 Pembina/IVa	KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA	Anggota
5	AHMAD BUDI HARJO, SE NIP. 197506162009041001 Pembina/IVa	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Belitung Timur,



YUSMAWANDI, S.Pd
Pembina TK I
NIP. 19670118 199003 1 002
























PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIAT

SUB BAGIANTATA USAHA

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Badan  YUSMAWANDI, S.Pd. NIP. 19670118 19900371 002 Penyusunan Laporan Kinerja (Lk)
Nama SOP	
Kualifikasi pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1, Menguasai kegiatan masing-masing bidang2, memahami perencanaan strategis3, Menguasai aplikasi microsoft word/exsell
Peralatan/perengkapan	<ol style="list-style-type: none">1, Komputer2, printer3, ATK
Pencatatan dan pendataan	- Capaian/realisasi indikator Capaian/realisasi indikator Dokumen Laporan Kinerja Dokumen Laporan Kinerja
Peringatan	Apabila prosedur tidak dilakukan maka berakibat pada penyusunan Laporan Kinerja
Dasar Hukum	<p>Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur</p> <p>Peraturan Bupati belitong Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur</p>
Keterkaitan	
1, SOP Pengumpulan Data Kinerja	
2,	
3,	

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LK)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			KET
		KABAN	KASUBBAG TU	TIM	STAF	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk penyusunan Laporan Kinerja					Surat masuk	1 hari	Disposisi pada surat masuk	
2	Membentuk Tim, memberi pengarahan					Disposisi pada surat masuk	1 hari	Tim Penyusun Laporan Kinerja	
3	Mengumpulkan bahan, merumuskan konsep Laporan Kinerja					DPA, Laporan Realisasi Anggaran, Data capaian kinerja	3 hari	Garis besar penyusunan Laporan Kinerja	
4	Menyusun konsep Laporan Kinerja					Garis besar penyusunan Laporan Kinerja	3 hari	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
5	Mengetik konsep Laporan Kinerja					Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 hari	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
6	Memeriksa konsep Laporan Kinerja. Jika setuju diserahkan kepada sekretariat. Jika tidak diserahkan kepada staf untuk diperbaiki				Tidak	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	3 hari	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
7	Memberi paraf					Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah diparaf	
8	Menandatangani Laporan Kinerja					Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah diparaf	1 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	
9	Memerintahkan untuk pengandaan dan pendistribusian					Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	1 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	
10	Mengagandakan, mengagandakan dan mendistribusikan					Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	15 Menit	Bukti pengiriman laporan	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUB BAGIANTATA USAHA</p>	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan oleh Kepala Badan</p> <p style="text-align: center;">  YUSMAWANDI SPd NIP. 19670118 1999003 1 002 Pengumpulan Data Kinerja </p> <p>Nama SOP Pengumpulan Data Kinerja</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur Peraturan Bupati belitong Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai kegiatan masing-masing bidang memahami perencanaan strategis Menguasai aplikasi microsoft word/exsell
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penanganan Surat Keluar SOP Penanganan Surat Masuk SOP Penyelenggaraan Rapat 	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer printer ATK
<p>Peringatan</p> <p>Apabila tidak disusun maka mempengaruhi penyerapan anggaran daerah</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>- Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KET
		KABAN	KA. TU	Staf	SUB BIDANG	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memerintahkan Kasubbag TU untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja					Jadwal kerja	15 Menit	Memo Disposisi		
2	Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja					Memo Disposisi	45 Menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja		
3	Memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja					Formulir pengumpulan data capaian kinerja	15 Menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja		
4	Membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada Sub bidang					Formulir pengumpulan data capaian kinerja	30 Menit	Tanda terima		
5	Mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja					Formulir pengumpulan data capaian kinerja	2 Hari	Data capaian kinerja		
6	Menyerahkan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasubbag TU					Data capaian kinerja	15 Menit	Data capaian kinerja		
7	Memerintahkan staf untuk merekap data capaian kinerja					Data capaian kinerja	1 Hari	Rekapitulasi data capaian kinerja		
8	Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada kasubbag TU					Rekapitulasi data capaian kinerja	15 Menit	Rekapitulasi data capaian kinerja		
9	Melaporkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada Kaban					Rekapitulasi data capaian kinerja	30 Menit	Rekapitulasi data capaian kinerja		
10	Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja, apabila setuju diserahkan kepada kasubbag TU untuk penyusunan Laporan Kinerja, jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan					Rekapitulasi data capaian kinerja	1 Hari	Rekapitulasi data capaian kinerja		
11	Menyimpan data kinerja					Rekapitulasi data capaian kinerja	15 Menit	Dokumen data capaian kinerja		